

**Jurnal MODERAT**, Volume 5, Nomor 4, November 2019, hlm 396-410 ISSN: 2442-3777 (cetak)  
Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat> ISSN: 2622-691X (online)

## **MODEL MANAJEMEN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Irwan<sup>1)</sup>, Muhammad Rusdi<sup>2)</sup>**

*Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia<sup>1)2)</sup>*

E-mail: [irwanirwan41083@gmail.com](mailto:irwanirwan41083@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis efektivitas pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini berorientasi pada tujuan jangka panjang sebagai referensi baru dalam pemungutan pajak. Sedangkan target khusus yang akan dicapai yaitu: merekomendasikan sebuah model manajemen pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan Pendekatan Sumber (resource approach), Pendekatan proses (process approach), Pendekatan sasaran (goals approach) dalam efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.*

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Motivasi Kerja, Pajak*

### **PENDAHULUAN**

Dalam perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, perlu dilakukan sebuah perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan itu bertujuan memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material khususnya dalam bidang perpajakan.

Pajak bumi dan bangunan juga dapat merangsang pertumbuhan dan pemberdayaan sebuah daerah dengan hasil yang didapatkan dari Pajak Bumi

dan Bangunan. Harapan besar ketika dikembalikan ke daerah maka akan dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai keinginan rakyat. Dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini sudah menjadi kerangka yang sangat ideal, apalagi sebagian besar dari dana pendapatan dikembalikan lagi ke daerah dalam bentuk DAK, DAU, dsb. Pajak dikategorikan pengelolaannya menjadi Pajak yang di kelola Pemerintah Pusat dan Pajak dikelola oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini tentunya

merupakan sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah menjadi dasar dalam undang-undang. Ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

Pajak sebagai salah satu sumber pemerintah dalam negeri merupakan sektor potensial, penerimaan sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Di Kabupaten Sidrap sendiri, Pemerintah Kabupaten Sidrap mengambil alih kewenangan tersebut pada bulan Januari 2014. Dalam beberapa bulan setelah mengambil alih kewenangan untuk mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tersebut, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai keputusan yang sudah ditetapkan DJP 2011 agar kiranya pajak daerah dan retribusi bisa dimaksimalkan dengan baik guna meningkatkan PAD di Kabupaten Sidrap.

Jauh sebelum undang-undang ini ditetapkan di Kabupaten Sidrap, pemerintah Kabupaten Sidrap sangat antusias terhadap Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, begitu pula dengan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap itu sendiri. Sebelum ditetapkannya undang-undang tersebut, begitu banyak perencanaan yang ingin dilakukan oleh Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap dalam mengelola pajak dan retribusi daerah

dalam menunjang PAD Kabupaten Sidrap itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rancangan model yang harus dilakukan Pemda Sidrap dalam meningkatkan PAD dikabupaten sidrap adalah pemungutan pajak daerah yang baik agar sesuai dengan perencanaan atau rancangan sebelumnya. Salah satu cara untuk meningkatkan pembayaran pajak adalah menggunakan model pelatihan dan rancangan pemungutan yang baik.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Tinjauan Konsep Efektivitas**

#### **a) Konsep Efektivitas Organisasi**

Sebelum menginjak pada teori yang mendasari penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kantor Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, maka akan dikemukakan beberapa pengertian efektivitas dan organisasi.

Kata efektif berasal dari kata "efek" dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Dari kacamata administrasi dan manajemen, dalam suatu organisasi selalu ada seseorang atau beberapa orang yang bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan sejumlah orang untuk bekerja sama dengan segala

aktivitas dan fasilitasnya, dan organisasi itu sendiri terdiri dari individu-individu dan kelompok karena efektivitas organisasi juga terdiri dari individu dan kelompok, tetapi efektivitas organisasi lebih sekadar penjumlahan efektivitas individu dan kelompok melalui efek sinergi, organisasi mendapatkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan penjumlahan bagian-bagiannya (Mustanir and Jusman 2016) (Mustanir, Madaling, et al. 2019) (Mustanir, Ramadhan, et al. 2019). Berdasarkan Ensiklopedi Umum Administrasi, Efektivitas berasal dari kata kerja Efektif, berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena mungkin hasil dicapai dengan penghamburan material, juga berupa pikiran, tenaga, waktu, maupun benda lainnya.

Kata efektivitas sering diikuti dengan kata efisiensi, dimana kedua kata tersebut sangat berhubungan dengan produktivitas dari suatu tindakan atau hasil yang diinginkan. Suatu yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien belum tentu efektif. Dengan demikian istilah efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar dan sesuai serta dengan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan efisien adalah hasil dari usaha yang telah dicapai lebih besar dari usaha yang dilakukan (Mustanir and Darmiah 2016) (Mustanir, Hamid, and

Syarifuddin 2019b) (Mustanir, Hamid, and Syarifuddin 2019a).

Dari pengertian diatas, efektivitas dapat dikatakan sebagai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dari 2 (dua) sudut pandang. Sudut pandang pertama, dari segi 'hasil' maka tujuan atau akibat yang dikehendaki telah tercapai. Kedua dari segi 'usaha' yang telah ditempuh atau dilaksanakan telah tercapai, sesuai dengan yang ditentukan. Dengan demikian pengertian efektivitas dapat dikatakan sebagai taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, baik ditinjau dari segi hasil, maupun segi usaha yang diukur dengan mutu, jumlah serta ketepatan waktu sesuai dengan prosedur dan ukuran-ukuran tertentu sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan yang telah ditetapkan.

Efektivitas setiap organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia, karena merupakan sumber daya yang umum bagi semua organisasi. Kinerja organisasi tergantung dari kinerja individu, dan manajer/pimpinan harus mempunyai kemampuan lebih dari sekedar pengetahuan dalam hal penentuan kinerja individu. (Akhmad, Mustanir, and Ramadhan 2017)(Mustanir 2018).

#### **b) Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas**

Ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, ialah: (1) karakteristik organisasi, termasuk struktur dan teknologi, (2) karakteristik lingkungan intern dan ekstern (Kholifah R and Mustanir 2019), (3) karakteristik

karyawan dan kebijakan praktik manajemen. Jadi ada tujuh variabel yang sangat berpengaruh dalam efektivitas yaitu struktur, teknologi, lingkungan ektern, lingkungan intern, karakteristik karyawan pada organisasi, prestasi kerja karyawan, dan kebijakan manajemen.

## **2. Konsep Manajemen**

Manajemen dapat dikatakan sebagai seni. Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui kerja sama dengan orang lain. Seni manajemen terdiri dari kemampuan untuk melihat totalitas di bagian-bagian yang terpisah dari suatu kesatuan gambaran tentang visi. Seni manajemen mencakup kemampuan komunikasi visi tersebut. Aspek-aspek perencanaan kepemimpinan, komunikasi dan pengambilan keputusan mengenai unsur manusia tentang cara menggunakan pendekatan manajemen seni. (Finarto Made, 2006) (Uceng et al. 2019) (Sellang, Kamaruddin; Ahmad, Jamaluddin; Mustanir 2019). Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban (2008 : 2) administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan

mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik. Dengan kata lain, ruang lingkup suatu administrasi publik meliputi dimensi-dimensi strategis berikut :

- 1) Dimensi Kebijakan
- 2) Dimensi Organisasi
- 3) Dimensi Manajemen
- 4) Dimensi Moral dan Etika
- 5) Dimensi Lingkungan
- 6) Dimensi Akuntabilitas Kinerja

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang pada Bulan Maret s/d April 2018 dengan harapan penulis dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti, di samping itu penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kantor Kecamatan Watang Pulu sebab salah satu kecamatan yang perlu pembenahan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal peningkatan efektivitas pemungutan PBB adalah di wilayah ini. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Unit analisis penelitian ini adalah organisasi, yakni Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap dimana berfokus pada penilaian aparat /

pegawai yang terlibat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari persepsi masyarakat wajib pajak. Penentuan unit analisis ini untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kepatuhan Wajib Pajak

#### a) Wajib Pajak Terdaftar

Dilihat dari persentase yang belum mencukupi berdasarkan fakta di lapangan bahwa masih ada sekitar 25 persen wajib pajak yang tidak terdaftar. Tidak ter daftarnya wajib pajak dan membuat kurangnya pencapaian sampai akhir tahun ini, dan bagai mana cara mengatasi wajib pajak yang belum mendaftarkan diri tersebut, untuk bisa meningkatkan efektivitas pemungutan PBB dalam rangka pemasukan anggaran PAD untuk tahun ke depannya.

Bapak kepala *UPTD PBB* “wajib pajak sudah pasti berperan penting dalam bertambahnya anggaran daerah, jadi, penting bagi wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya, karena untuk mengetahui berapa jumlah pembayar pajak yang harus di bayar, dilihat dari NPWP nya, dan bisa di pastikan dalam pendaftaran wajib pajak, sudah banyak yang seharusnya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak tetapi belum mendaftarkan diri dikarenakan masih kurangnya penghasilan yang dimiliki misalnya, itu bisa mengurangi tingkat pencapaian, ( 14 maret 2019)

Ramli selaku kepala staf UPTD

“kebanyakan yang ingin mendaftarkan diri itu ketika sudah ingin membuka usaha dan ingin mendaftar untuk bekerja. Jadi pendaftaran yang di isi untuk mendapat NPWP berguna bagi kami, agar bisa mendata wajib pajak yang nakal. Mungkin seperti itu (13 Maret 2019) Ibu Andi Aminarni Kepala Bidang Pajak dan PBB, “ jika di persentasekan lagi, sekitaran 5 persen dari 25 persen tadi, mengapa saya mengatakan seperti itu, karena dalam pendaftaran wajib pajak untuk bisa mendaftarkan diri ini bukan masalah wajib pajak berpenghasilan atau tidaknya tapi sebaik nya mendaftarkan agar sudah mendapatkan NPWP nya, seperti itu, agar kita juga bisa tahu apakah ada tambahan potensi yang bisa meningkatkan pemasukan, atau ada yang berkurang dalam hal ini penyampaian surat pemberitahuan (SPT) dan dari situ kami dapat mengimput, jika terjadi kesalahan atau ada yang tidak cocok saat mengimput, kami kembalikan lagi ke tempat masing-masing (kelurahan / desa) bisa juga di kecamatan. Jika dibilang tidak terdaftarnya wajib pajak, mungkin sangat sedikit persentase jika dia masuk dalam 25 persen tadi, walaupun ada. (10 MARET 2019)

Ramli “sebenarnya untuk mengatasi wajib pajak yang nakal atau tidak mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sangat susah, kami hanya memberikan 1 orang setiap kecamatan untuk memonitoring apa saja yang perlu diperbaiki dan kendala-kendala di setiap kecamatan, tetapi masih belum

efektif menurut saya karena yang di monitoring adalah kota walaupun hanya kecamatan, tetapi kecamatan di Watang Pulu sangat luas. walaupun kita memaksimalkan kerja kami sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan, kuncinya itu kesadaran wajib pajak kembali yang sangat diperlukan untuk bisa mengerti akan pentingnya pembayaran pajak tersebut.,(13 Maret 2019)

Masalah kepatuhan wajib pajak dalam hal ini terdaftarnya wajib pajak yang merupakan pengukur tingkat keefektifan pemungutan PBB ini menurut penulis sesuai yang dikatakan bapak UPTD dan Ramli dan staf UPTD PBB diatas masih ada masyarakat yang seharusnya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak belum sepenuhnya bisa mendaftarkan karena berbagai contoh yang di paparkan, dan mengakibatkan kurangnya persentase atau target yang disasarkan

b) Wajib pajak menyetorkan Surat Pemberitahuan.

Penyetoran Surat Pemberitahuan untuk wajib pajak itu sendiri berguna untuk mengetahui berapa banyak, yang harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri, dari jumlah kekayaan wajib pajak, serta merupakan indicator untuk mengukur tingkat keefektifan pemungutan PBB itu sendiri.

Kepala Bidang Pajak dan *PBB* " kalau menurut saya proses Penyetoran SPT saya rasa lumayan, kenapa saya bilang lumayan, karena proses penyetoran SPT itu kita kerja sama dengan kecamatan, untuk membantu kerja kami, dan bentuk modelnya itu

DISPENDA yang olah dan DISPENDA cetak, kemudian di bagi di setiap kecamatan, dan bagaimana dia mendistribusikan sendiri untuk menyampaikan di setiap wajib pajak yang terdaftar di kecamatan, entah itu dia bagi di kelurahan," dan begitupun sebaliknya, apabila ada SPT untuk disetorkan, harus kecamatan yang memberikan kepada kami, (10 Maret 2019)

Ramli, ".masalah yang harus di selesaikan untuk penyetoran SPT itu sendiri, tidak bisa di pungkiri kami dari DISPENDA, hanya bergantung dari penyetoran SPT tersebut, karena kami tidak dapat mengimput data hasil potensi wajib pajak, jika penyetoran terlambat, dan kami merasa kewalahan untuk mengimput, sebab kebanyakan wajib pajak memberikan SPT bersamaan pada waktu jatuh tempo pembayarannya. Jadi pengimputan biasa terlambat". (13 Maret 2019)

Kepala UPTD PBB "menurut saya penyetoran SPT wajib pajak, ini yang membuat pencapaian kami dan PAD tidak terlalu banyak, karena jumlah wajib pajak yang terdaftar lebih banyak dibanding jumlah SPT yang masuk, dan ini yang membuat kami kewalahan, dan merasa kinerja yang di lakukan selama 1 tahun kurang efektif karena pengimputan data di lakukan 2 kali setahun dan range nya itu menurut saya sudah lama, tetapi masih banyak yang melaporkan atau memberikan SPT nya itu pada saat ingin perhitungan, serta biasa juga penyampaian SPT lewat pada masa pembayaran, (14 Maret 2019).

Dari berbagai penjelasan yang diberikan para petinggi UPTD PBB Kabupaten Sidrap, penulis bisa berpendapat bahwa keefektifan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidrap, sangat berpengaruh pada penyetoran Surat Pemberitahuan oleh wajib pajak, dikarenakan dalam penyetoran Surat Pemberitahuan itu pengelola UPTD PBB bisa melihat potensi serta mengetahui jumlah pembayaran yang akan di bayar oleh wajib pajak itu sendiri, dan dari penjelasan diatas bahwa yang mengakibatkan ketidakefektifan pemungutan PBB-P2 kurangnya penyetoran SPT dari wajib pajak itu sendiri.

c) Tidak Adanya penyelundupan bagi wajib pajak

Agar pemungutan pajak bisa berjalan dengan lancar, sangat di perlukan tim penilai, yang dikatakan bapak UPTD yang sudah di sekolahkan dan mempunyai karakter yang baik, ini berguna agar tidak adanya penyelundupan pajak, seperti halnya, kurangnya pembayaran bunga yang diberikan, atau pembayaran tidak sesuai dengan hasil perhitungan NJOP yang sudah di tetapkan, dan juga biasa adanya pungli, atau biasa disebut sebagai mafia pajak.

Ramli “ jika kita dengar perkataan dari bapak UPTD, mungkin sedikit yang saya tambahkan, tentang penyelundupan seperti itu, bisa juga terjadi ketika bunga tidak terbayarkan. Itu kan merupakan penyelundupan, tetapi itu tidak bisa terjadi, karena kami memiliki sistem yang akan tampil

ketika, ingin membayar, tapi penunggakannya tidak terbayar, kami tidak akan melayaninya. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan. (10 desember2019)

Kepala UPTD “Saya rasa secara pribadi, pemungutan liar untuk pbb ini, tidak mungkin terjadi, karena di sini kami diawasi oleh pusat jika ada yang bermasalah seperti ini, akan mudah di tahu, karena pasti akan beda bentuk realisasi anggaran yang di keluarkan, dibanding SPT yang di berikan oleh wajib pajak itu sendiri, jadi apabila pungli itu terjadi, mungkin akan dilaporkan langsung ke daerah atau pusat, tak terkecuali itu diri saya sendiri.” (14 Maret 2019).

Berikut penjelasan kedua kepala UPTD beserta Staffnya dalam hal penyelundupan pajak, tidak pernah terjadi ketika akan terjadi hal-hal yang kiri atau dalam hal ini mafia pajak tersebut, dan dalam hal penyelundupan pajak menurut penulis sudah efektif dalam penjagaan atau pendataan yang dilakukan UPTD PBB sudah berjalan baik, karena tidak pernah ada penyelundupan pajak di Kabupaten Sidrap.

d) Pembayaran penunggakan pajak untuk wajib pajak

Dalam kepatuhan perpajakan, salah satu diantaranya pembayaran penunggakan pajak, pemberian bunga setiap bulannya ketika pembayaran sudah lewat dari tanggal yang diberikan oleh DISPENDA Kabupaten Sidrap.

Kepala UPTD PBB “Kalau masalah mafia pajak yang sama halnya

penyelundupan dengan sistem yang sama yang di katakana Ramli sebelumnya tentang bunga 2 persen,, dan saya rasa di sini bukan kawasannya untuk penunggakan yang tidak terbayar, karena kami sudah ditegaskan, siapa pun pelakunya, kami tidak akan menerima pembayarannya jika ada masalah administrasinya belum selesai semua, dan apa bila ada juga penunggak pajak tidak membayar di sini tidak bisa, karena kami memiliki data langsung, dan tertera, kapan dia menunggak, sudah berapa bulan, serta berapa lama dia tidak membayar jadi selama ini tidak ada wajib pajak yang menunggak dan bisa tidak membayar bunganya, semua sudah terdata sendirinya dengan itu, pemungutan pajak yang berkaitan dengan penyelundupan, penunggakan bunga, semuanya berjalan efektif.

Ramli "masalah penunggakan wajib pajak Masih banyak, kami juga memberikan bunga 2 persen setiap wajib pajak yang menunggak pembayarannya, sekitar 40 - 45 persen lah hasil dari kami itu ada tambahan dari bunga 2 persen tersebut. Dan tidak alasan untuk tidak membayar bunga tersebut, karena kami tidak akan melayani jika bunga tidak terbayarkan.

Ibu Andi Aminarni Kepala Bidang Pajak dan PBB, " bentuk pendataan yang menunggak itu kami lakukan dengan Cara melihat permohonan yang masuk yang diberikan ke kecamatan untuk memfasilitasi wajib pajak yang bermasalah, dan kami juga melihat laporan potensi yang ada di setiap desa

/ kelurahan, apakah ada perubahan pembangunan di daerah tersebut, apa bila ada yang menunggak kecamatan yang fasilitasi, atau desa / kelurahan itu sendiri. Tetapi masih banyak masyarakat yang bermohon sendiri. Karena ada kepentingan mendesak setiap orangnya, bentuk tegurannya itu sederhana saja, kami hanya memberikan surat kepada daerah atau zonanya karena kami juga tidak tahu betul siapa yang menunggak, dan tidak membayar, karena kami hanya melihat dari data yang masuk.

Dari penjelasan yang dipaparkan oleh semua informan key mengatakan, pembayaran pajak ini membuat kurang maksimalnya pengimputan data yang akan di berikan oleh daerah karena pembayaran oleh wajib pajak kurang tepat waktu, dari sini penulis dapat menggambarkan bahwa wajib pajak di Kabupaten Sidrap masih kurang Peka dalam hal ini pembayaran yang belum tepat pada waktunya walaupun ada penunggakan bagi wajib pajak yang terlambat membayar, tetapi dalam pengimputannya sangat membuat pengelolaan yang kurang efektif.

Dari keempat indikator untuk mengukur efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidrap, diantaranya yaitu, Pendaftaran Wajib Pajak, Penyetoran SPT Wajib Pajak, Tidak adanya Penyelundupan Pajak, dan Pembayaran penunggakan wajib pajak, penulis beranggapan dari penjelasan semua diatas bahwa, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Sidrap yang Di laksanakan oleh DISPENDA

Kabupaten Sidrapsejauh ini efektif karena peningkatan yang diberikan untuk tahun ini memuaskan, walaupun tingkat kepatuhan wajib pajak yang sedikit bertambah setiap tahunnya.

Serta pencapaian target yang melewati 50 persen untuk setiap kecamatan, dari semua kecamatan dan penerimaan yang naik dari tahun sebelumnya, membuat UPTD PBB Kabupaten Sidrap menjalankannya dengan baik dalam menunjang peningkatan PAD Kabupaten Sidrap di tahun 2019. Dan Kesadaran Wajib Pajak untuk menjalankan Kepatuhan Wajib Pajaknya Perlu di tingkatkan untuk ke depannya agar setiap Kecamatan bisa mencapai 100 persen dan meningkatkan PAD Kabupaten Sidrap untuk ke depannya.

Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan atas hasil analisis penelitian di bab sebelumnya, yang dipadukan dengan landasan teori yang ada sehingga diperoleh suatu konsep efektivitas pemungutan PBB dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Robbins menjelaskan bahwa efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituen strategis, minat mengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi.

Siagian (Dalam Indrawijaya 2010:175) memberikan pengertian tentang efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu: "penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya

apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu."

Sampel dalam penelitian ini adalah aparatur pelaksana PBB lingkup Kantor Kecamatan Watang Pulu dengan jumlah responden secara keseluruhan adalah 100 orang. Maka ditemukan:

1. Kepatuhan wajib pajak

Aspek yang dinilai dari kepatuhan wajib pajak adalah ada 4 (empat) indikator yakni :

a. Wajib pajak terdaftar

Tingkat efektifitas pemungutan PBB sangat tergantung dari wajib pajak terdaftar yang ada di lingkup Kantor Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang yang sudah mulai baik tingkat pendataannya namun masih ada sekitaran 25% dari jumlah wajib pajak yang belum terdata dan terdaftar dengan baik tapi wajib pajak ini hanyalah wajib pajak usaha dan perseorangan. Sedangkan wajib pajak khusus pajak bumi dan bangunan (PBB) sudah terdata dan terdaftar secara baik, semakin besar jumlah wajib pajak yang tidak terdaftar maka tingkat efektivitas pemungutan PBB tidak akan optimal.

b. Wajib pajak menyetorkan surat pemberitahuan

Efektivitas pemungutan PBB sangat bergantung dari SPT dan SPP yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang,

olehnya itu DIPENDA harus bekerja selaras dan bersinergi kuat dengan kolektor PBB di tingkat desa / kelurahan agar terjadi efektivitas pembayaran PBB. Namun yang terjadi di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar lebih banyak dibanding jumlah SPT yang masuk dan inilah yang membuat UPTD PBB kewalahan dan kinerja pemungutan kurang efektif.

c. Tidak adanya penyelundupan bagi wajib pajak

Jika terjadi penyelundupan bagi wajib pajak, maka efektivitas pemungutan PBB akan tidak berjalan normal karena ulah mafia pajak ini. Olehnya itu pemungutan pajak akan berjalan dengan lancar jika para petugas pemungut pajak terampil dan mempunyai karakter yang baik dalam hal kedisiplinan dan motivasi kerja sebab penyelundupan pajak tidak akan terjadi dengan sistem pungli atau adanya mafia pajak sebab pajak dibayarkan dengan sistem yang sudah baik dan akan terdeteksi cepat jika ada pelaporan atau pembayaran yang menyalahi prosedur. Penerapan sistem wajib pajak secara terprogram ini sudah dilaksanakan di Lingkup UPT PBB Kantor Kecamatan Watang Pulu guna pendeteksian dan proteksi penyalahgunaan PBB.

d. Pembayaran penunggak pajak untuk wajib pajak

Pembayaran penunggak pajak untuk wajib pajak tidak akan diterima jika masih ada masalah administrasi lain yang belum

selesai sehingga akan berjalan dengan efektif. Namun masalah penunggak pajak masih banyak yang belum membayar tunggakannya dan jika belum membayar tunggakannya maka ia akan dikenakan bunga 2% dari total pembayaran, hal ini dilakukan untuk memberikan efek supaya penunggak pajak dapat membayar tepat waktu. Hal ini sudah diterapkan juga di UPT PBB Lingkup Kantor Kecamatan Watang Pulu guna lebih meningkatkan tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu aset dalam pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai berikut :**

1. Motivasi Kerja

Penilaian tentang motivasi kerja ditinjau dari 2 (dua) aspek yakni : (1) keinginan untuk berprestasi sesuai dengan bidang tugas dan kemampuan, (2) tingkat rasa percaya diri dan dihargai.

Kategorisasi jawaban responden mengenai indikator keinginan untuk berprestasi didapatkan nilai 83,50% dalam kategori sangat baik / sangat memuaskan. Ini berarti bahwa motivasi kerja pegawai dalam melakukan pemungutan PBB dari aspek keinginan untuk berprestasi sesuai dengan bidang tugas dan kemampuannya berjalan

dengan baik dan ini dibuktikan dengan tanggapan responden / aparatur dengan kategori sangat baik.

Kategorisasi jawaban responden tentang motivasi kerja dari aspek tingkat rasa percaya diri dan dihargai didapatkan nilai 80,25% dalam kategori sangat baik / sangat memuaskan juga. Hal ini membuktikan bahwa motivasi kerja petugas pemungut / kolektor PBB juga sangat baik ditinjau dari aspek rasa percaya diri.

## 2. Kemampuan Kerja

Kemampuan kerja didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki secara individu untuk melakukan suatu pekerjaan, dalam hal ini untuk melaksanakan beban tugas secara professional. Dalam penelitian ini kemampuan personal dijelaskan oleh beberapa indikator, yaitu (1) pendidikan, (2) pelatihan dan (3) pengalaman.

Dari variabel kemampuan kerja berdasarkan aspek kependidikan mendapatkan nilai 83,25% (sangat baik), indikator pelatihan dengan nilai 87% (sangat baik), dan indikator pengalaman dengan nilai 85,25% (sangat baik). Dari ketiga indikator tersebut ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan yang baik, disertai dengan pelatihan keterampilan dan pengalaman yang lama akan dapat sangat bermanfaat dalam menunjang dalam peningkatan kemampuan kerja dan efektivitas kerja karyawan.

## 3. Suasana Kerja

Suasana kerja adalah salah satu aspek dominan dalam peningkatan

efektivitas kerja staf, sebab tanpa suasana kerja yang baik maka kinerja staf tidak akan maksimal.

Penilaian suasana kerja dalam penelitian ini ditinjau dari 2 (dua) aspek 1) Hubungan kerja antara bawahan dengan atasan dengan nilai skor kualitas yang didapat sebesar 88,75% (sangat baik). Dan yang selanjutnya 2) Hubungan antar pegawai dengan nilai kualitas skor yang didapat sebesar 85,50% (sangat baik). Ini membuktikan bahwa suasana kerja di lingkup kerja Kantor Kecamatan Watang Pulu sangat baik.

## 4. Lingkungan Kerja

Kenyamanan lingkungan kerja yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. Nilai kualitas lingkungan yang di dapat sebesar 83,00% (sangat baik). Ini menyatakan bahwa kondisi sarana dan prasarana layanan yang bersih dan rapi serta teratur di lingkup kerja Kantor Kecamatan Watang Pulu sudah sangat baik.

## 5. Perlengkapan dan Fasilitas Kerja

Adanya fasilitas kerja akan membuat karyawan merasa nyaman dalam bekerja dan menimbulkan semangat kerja untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh perusahaan. Peningkatan efektivitas dapat ditunjang dengan adanya penyediaan fasilitas kerja yang dapat membantu dan memotivasi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan kantor dengan baik.

Adapun nilai kualitas scoring dari

responden yang di hasilkan dari indikator perlengkapan dan fasilitas kerja adalah sebesar 83,00% (sangat baik), yang berarti bahwa perlengkapan dan fasilitas kerja sudah sangat baik namun masih perlu pengadaan fasilitas kendaraan karena adanya nilai tingkat kepuasan kurang baik sebesar 42% dan ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.

#### 6. Prosedur Kerja

Prosedur kerja adalah tahapan dan langkah-langkah strategis yang dilaksanakan sebagai upaya mencapai target dalam hal efektivitas pemungutan PBB sehingga lebih mempermudah dalam hal penagihan dan pembagian lokasi penagihan.

Sekaitan dengan prosedur kerja nilai kualitas yang di dapat sebesar 84,50% (sangat baik) yang berarti prosedur kerja karyawan di lingkup kerja Kantor Kecamatan Watang Pulu sudah sangat baik.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan sebagai berikut :

1. Analisis efektivitas pemungutan PBB dari aspek tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkup Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kategori sudah sangat patuh / sangat baik hal ini didasarkan pada hasil penelitian dari indikator wajib pajak terdaftar, jumlah wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan, dan tidak adanya penyelundupan pajak serta pembayaran tunggakan

pajak yang juga sudah masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini berarti bahwa tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di lingkup Kantor Kecamatan Watang Pulu sudah sangat baik.

2. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di lingkup Kantor Kecamatan Watang Pulu berdasarkan hasil penelitian sudah sangat baik / memuaskan ditinjau dari indikator motivasi kerja, kemampuan kerja, suasana kerja, lingkungan kerja, perlengkapan dan fasilitas dan prosedur kerja. Hal ini berarti bahwa berdasarkan indikator tersebut diatas secara umum ditarik kesimpulan bahwa pemungutan pajak sudah efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Ahmad, H. Jamaluddin. 2012. *Jurnal Praja Ilmiah Pemerintahan. Edisi Volume 1 / Nomor 1 / Oktober 2012. ISSN: 2302-6960. STISIP Muhammadiyah Rappang. Rappang.*
- Ahmad, Jamaluddin. 2011. *Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan*. Badan Penerbit UNM. Makassar
- Ahmad, Jamaluddin (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik*

- Teori dan Aplikasinya* : Kholifah R, Emy, and Ahmad Yogyakarta. Penerbit Gava Media
- Akhmad, Israwaty, Ahmad Mustanir, dan Muhammad Rohady Ramadhan. 2017. *"Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang."* In , 89–103.  
<http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/konferensi-appptm-ke-7-meningkatkan-kualitas-dan-kuantitas-jurnal-ilmiah>.
- Darwin, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, mitra wacana. Jakarta
- Darwin. Drs. MBP. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Hasbar, Mustafa. 2014. *Menguak Perilaku Organisasi Sektor Publik Antara Teori dan Aplikasi*. Ombak. Yogyakarta.
- Ibrahim I, Adam, 2010, *Teori, Perilaku, Dan, Budaya Organisasi*, refika aditama, Bandung.
- Kencana S, Inu, 2011, *Manajemen Pemerintahan*, , Pustaka Reka Cipta, Bandung
- Mustanir. 2019. *"Food Policy and Its Impact on Local Food."* In *Proceeding ICOGISS 2019*, 27–38. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.  
<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/ICOGISS19/article/view/2465>.
- Lahibu Tuwu. 2012. Disertasi. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Pengembangan Karir, Motivasi Kerja Terhadap Kinerja dan Kualitas Layanan Sumber Daya Manusia Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton*. Program Pascasarjana UMI. Makassar.
- Mardiasmo, 2011, *perpajakan edisi revisi*, Andi, Yogyakarta
- Marsono.1986. *Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan*. Djambatan. Jakarta
- Moleong, Lexi J,Dr.M.A. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustanir, Ahmad. 2018. *"Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Optimalisasi Pelayanan Publik Dan Potensi Desa Sereang."* Rappang.  
[https://www.researchgate.net/publication/331064206\\_Pemanfaatan\\_Teknologi\\_Informasi\\_Dalam\\_Optimalisasi\\_Pelayanan\\_Publik\\_da](https://www.researchgate.net/publication/331064206_Pemanfaatan_Teknologi_Informasi_Dalam_Optimalisasi_Pelayanan_Publik_da)

n\_Potensi\_Desa\_Sereang.

article/view/69.

- Mustanir, Ahmad, and Darmiah Darmiah. 2016. "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Politik Profetik* 4 (2): 225–38. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749>.
- Mustanir, Ahmad, Hariyanti Hamid, and Rifni Nikmat Syarifuddin. 2019a. "Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Metode Partisipatif." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5 (3): 227–39. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2677>.
- . 2019b. "Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional." In *Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2019*. Yogyakarta.
- Mustanir, Ahmad, and Jusman. 2016. "Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Ilmiah Akmen* 13 (3): 542–58. <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/>
- Mustanir, Ahmad, Madaling Madaling, Andi Uceng, M.Nurzin R Kasau, Barisan Barisan, and Dewi Andriani. 2019. "Karakteristik Kepemimpinan Lurah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)* 2 (2): 145–72.
- Mustanir, Ahmad, Muhammad Rohady Ramadhan, M Rais Rahmat Razak, Lukman Lukman, Sapri Sapri, and Takhrim Takhrim. 2019. "Peranan Camat Dan Komunikasi Pemerintahan Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang." *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)* 2 (2): 94–114.
- Pasolog Hasbani, 2004, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, alfabeta, Bandung
- Resmi Siti, 2013, *Perpajakan Teori Dan Kasus*, salemba empat, Jakarta selatan
- Robbins, Stephen P. (1996), *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, aplikasi*, (Jakarta Prenhallindo)

- Rochmat Soemitro, Prof.Dr.H.S.H., dan Zainal Muttaqin, S.H. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan (edisi revisi)*. Bandung. PT Refika Aditama. (Bandung:Alumni)Aplikasinya, Rajawali, Jakarta
- Sellang, Kamaruddin; Ahmad, Jamaluddin; Mustanir, Ahmad. 2019. *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Edited by Qiara Media. 1st ed. Rappang: CV. Penerbit Qiara Media. [https://play.google.com/store/books/details/Kamaruddin\\_Sellang\\_S\\_Sos\\_M\\_AP\\_STRATEGI\\_DALAM\\_PENIN?id=U06rDwAAQB\\_AJ](https://play.google.com/store/books/details/Kamaruddin_Sellang_S_Sos_M_AP_STRATEGI_DALAM_PENIN?id=U06rDwAAQB_AJ).
- Supramono dan Damayanti, Theresia Woro. 2009. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV Andi
- Sugiyono, 2003, metode penelitian administrasi, Alfabeta, Bandung
- Sutrisno Edy 2007, budaya organisasi, Kencana, Jakarta
- Terry, George R. & Stephen Franklin (1982), *Principle of Management*, (Illionis: Richard D. Irwin), terjemahan Winardi (1995), *Asas-asas Manajemen* (Bandung:Alumni)Aplikasinya, Rajawali, Jakarta
- Thorlakson, J.H. Alan & Murray P. Robert (1996), *An Empirical Study of Empowerment in the Workplace, Group & Organization Management*, Vol.21, No.1, hal. 67-83
- Uceng, Andi, Akhwan Ali, Ahmad Mustanir, and Nirmawati Nirmawati. 2019. "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang." *Jurnal MODERAT* 5 (2): 1-17. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2125>
- Waluyo, 2007, *Manajemen Publik "Konsep, Aplikasi, dan Implementasi dalam pelaksanaan otonomi daerah"*, Mandar Maju, Bandung., 2013 perpajakan esensi dan aplikasi, TMbooks, Sleman.
- Yeremias T. Kaban. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.